



DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT **RENJA** **2026**

📍 Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi
✉ dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com
🌐 www.dinkes.papuabaratprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 selesai disusun sebagai perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk melaksanakan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 serta memuat rumusan rencana kerja program/kegiatan dan pendanaannya.

Sebagai suatu dokumen resmi, Renja mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dilaksanakan melalui proses perencanaan berbasis elektronik melalui aplikasi SIPD. Penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini telah memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga telah memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

sehingga diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan rencana program/kegiatan yang telah dirumuskan pada tahun 2026.

Kami menerima masukan yang sifatnya membangun karena menyadari bahwa dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 ini masih jauh dari kesempurnaan. Kami sangat memerlukan intervensi program/kegiatan dari para pihak sebagai wujud integrasi dari program/kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan PAPUA BARAT SEHAT.

Akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi masyarakat Provinsi Papua Barat dalam menikmati hasil pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Papua Barat yang berkualitas. Salam Papua Barat SEHAT

Manokwari, 10 Oktober 2025



**Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Papua Barat**

dr. Alwan Rimosan, Sp.B.Finacs
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 196910272000121004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024	14
2.1. Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.....	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT.....	54
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.....	58
	3.3. Program dan Kegiatan	66
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026	77
	4.1. Rencana Kerja	77
	4.2. Pendanaan	77
BAB V	PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	31
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	41
Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Papua Barat.....	52
Tabel 3.1 Sasaran Utama Kesehatan untuk Semua Tahun 2025-2029	56
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	63
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	68
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026 Provinsi Papua Barat	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan disusun, direncanakan dan dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik yang selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan

intervensi berbasis risiko kesehatan. Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran rencana selama Tahun 2026 yang disusun berdasarkan acuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 - 2029. Selain itu Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen rencana tahunan Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dan RPJMN Tahun 2025- 2029 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan telah dirasa cukup dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian masih ada permasalahan di bidang kesehatan yaitu masih adanya kasus kematian ibu dan balita serta permasalahan gizi di masyarakat seperti stunting. Masih cukup tingginya angka penyakit menular potensial wabah dan penyakit akibat gaya hidup seperti penyakit degeneratif juga merupakan permasalahan ganda yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. ketersediaan sarana prasarana, alat kesehatan/penunjang medik lainnya yang belum memenuhi standar serta tidak meratanya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten hingga kecamatan serta pelayanan kesehatan yang belum terintegrasi karena belum ada sistem kesehatan daerah yang didukung dengan akses layanan kesehatan berbasis teknologi merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat.

Sesuai dengan arah penyelenggaraan pembangunan kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai pelaku pembangunan kesehatan wajib menyusun program dan kegiatan strategis atau biasa disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun dan program dan kegiatan per tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 didasarkan pada penjarangan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dengan tetap mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 juga mengkaji terlebih dahulu kondisi evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan RPJMD

Provinsi Papua Barat, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya RKA tersebut akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Legislatif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, maka Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 dan merupakan bagian dari penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 111);
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025 - 2029
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 143);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang uraian tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 ini yaitu peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 ini adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk mencapai tujuan mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2026;
2. Menjadi acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang kesehatan tahun 2026; dan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan kesehatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program/kegiatan prioritas Daerah) dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN

2.1. Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Pengukuran Pelaksanaan Renja Provinsi Papua Barat Tahun 2025 maupun Tahun sebelumnya (2024) merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Barat.

Pengukuran kinerja dilakukan pada indikator kinerja yang telah direncanakan

dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun sebelumnya meliputi:

1. Realisasi indikator sasaran dan program yang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi indikator sasaran dan program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi indikator sasaran dan program yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
1	2	1	00:00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
1	2	1	00:00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%	
1	2	1	00:00	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%	
1	2	1	00:00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0%	
X	XX	1	1.01	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	275	Data	0	Data	0	Data	0	Data	0%	0	Data	0	Data	0%	
X	XX	1	1.01	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.						Prakiraan Realisasi Capaian Target					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)
x	xx	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
x	xx	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	20%
x	xx	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	0	Paket	0	Paket	0%
x	xx	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	20%
x	xx	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	20%
x	xx	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	25%
X	XX	01	01:26	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	20%
X	XX	01	01:26	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	20%
X	XX	01	01:40		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
X	XX	01	01:40	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	3	Unit	1	Unit	20%
X	XX	01	01:40	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	0	Paket	0	Paket	0%
X	XX	01	01:40	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
X	XX	01	01:55		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
X	XX	01	01:55	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	0	Laporan	0%
X	XX	01	01:55	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	20%
X	XX	01	01:55	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	20%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.			Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target						
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1				2		3		4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)
X	XX	01	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
X	XX	01	02:09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	84	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%	
X	XX	01	02:09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	236	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	3	Unit	3	Unit	1%	
X	XX	01	02:09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	430	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	34	Unit	34	Unit	8%	
X	XX	01	02:09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia Harapan Hidup	71,15	Tahun	0	Tahun	0	Tahun	0	Tahun	0%	69,45	Tahun	69,45	Tahun	98%	
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2,2	Rasio TT : 1000 Penduduk	0	Rasio TT : 1000 Penduduk	0	Rasio TT : 1000 Penduduk	0	Rasio TT : 1000 Penduduk	0%	1,8	Rasio TT : 1000 Penduduk	1,8	Rasio TT : 1000 Penduduk	82%	
						Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	112	Angka Kematian Ibu	0	Angka Kematian Ibu	0	Angka Kematian Ibu	0	Angka Kematian Ibu	0%	158	Angka Kematian Ibu	158	Angka Kematian Ibu	141%	
						Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100,00	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
						Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	28,34	Angka Kematian Balita	0	Angka Kematian Balita	0	Angka Kematian Balita	0	Angka Kematian Balita	0%	36,74	Angka Kematian Balita	36,74	Angka Kematian Balita	130%	
						Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	100,00	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
						Cakupan Kepesertaan JKN	99,00	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	98,6	Persen	98,6	Persen	100%	
						Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM	71,43	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	14,29	Persen	14,29	Persen	20%	
						Positive Rate HIV	1,96	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	2,21	Persen	2,21	Persen	113%	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan					Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan					Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)					Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)					Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.						Prakiraan Realisasi Capaian Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024							Tingkat Realisasi (%)		Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1					2					3					4					5					6				7				8 = (7/6)		9				10 = (5+7+9)				11= (10/4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.					Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	14%
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	2	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	20%
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	23	Layanan	0	Layanan	0	Layanan	0	Layanan	0%	3	Layanan	3	Layanan	13%
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	4	Unit	4	Unit	80%
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5,00	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	7	Unit	7	Unit	140%
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	32	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.				Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)	11= (10/4)	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	32	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	2	Unit	20%
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	20%
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	6715	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	1000	Orang	1000	Orang	15%
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6715	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	1000	Orang	1000	Orang	15%
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.			Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target							
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.				Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	20%
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	20%
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	178072	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%	0	Keluarga	0	Keluarga	0%
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.						Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)					Prakiraan Realisasi Capaian Target		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)	
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	45	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	2	Unit	4%
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	54	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	2	Unit	4%
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	57,14	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	14,29	Persen	14,29	Persen	25%
						Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	2,73	Per 1000 Penduduk	0	Per 1000 Penduduk	0	Per 1000 Penduduk	0	Per 1000 Penduduk	0	Per 1000 Penduduk	0%	10,09	Per 1000 Penduduk	10,09	Per 1000 Penduduk	370%
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1.03	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.			Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	79,01	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	23,75	Persen	23,75	Persen	30%
						Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	40	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	20	Orang	20	Orang	50%
						Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	71,42	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	28,57	Persen	28,57	Persen	40%
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	25	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	25	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	57	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	30	Orang	30	Orang	53%
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%
1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	135	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	23	Orang	23	Orang	17%
1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	77358,838	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	17315	Orang	17315	Orang	22%

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.					Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)					Prakiraan Realisasi Capaian Target		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)
1	02	03	4,04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil		100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	#DIV/0!	0	Persen	0	Persen	0%	
1	02	03	4,04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	35	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%	
1	02	03	4,05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik		100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%	
1	02	03	4,05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnyadi daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	35	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%	
1	02	03	4,07		Pendayagunaan tenaga kesehatan		100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%	
1	02	03	4,07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	35	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%	
1	02	03	4,08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP		100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%	
1	02	03	4,08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
						Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.			Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target		
1					2	3	4		5		6			7		8 = (7/6)		
1					2	3	4		5		6			7		8 = (7/6)		
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	100	Persen
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	15	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	3	Sarana
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	100	Persen
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	5	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	0	Sarana	1	Sarana
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	7	Kabupaten	0	Kabupaten	0	Kabupaten	0	Kabupaten	0	Kabupaten	3	Kabupaten
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	100	Persen
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.			Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Prakiraan Realisasi Capaian Target													
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1					2					3					4		5		6			7		8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11= (10/4)
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%							
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	20%							
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	0	Persen	0	Persen	0%							
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%							
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	71,42	Persen	71,42	Persen	71%							
1	02	07	3.01		Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna	75	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	67	Persen	67	Persen	89%							
						Persentase Puskesmas terakreditasi	97,53	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0%	96,29	Persen	96,29	Persen	99%							
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	29	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%							
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	29	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%							
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	29	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%							

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan / Sub. Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub.			Target Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	13,09 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0%	22,6 Persen	22,6 Persen	173%
		Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0%	100 Persen	100 Persen	100%
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0%	100 Persen	100 Persen	100%
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
1 02 02		Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	67,82 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0%	0 Tahun	0 Tahun	0%
1 02 02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	20315 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1 02 02 1.02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0%	100 0	100 Persen	100%
1 02 02 1.02 0016	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	20315 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	3315 Orang	3315 Orang	16%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Pencapaian kinerja yang baik dan atau sesuai dengan target akan membantu proses percepatan terwujudnya Masyarakat Provinsi Papua Barat yang Sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya pembangunan kesehatan dengan indikator kinerja pencapaian pembangunan kesehatan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1	Usia Harapan Hidup	-	-	66,31	69,45	69,79	70,13	68,47	-	70	70	
2	Prevalensi Stunting	-	-	22	22,6	20,26	18,16	14,73	-	20	18	
3	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	-	-	N/A	14,29	14,29	14,29	N/A	-	14	14	
4	Usia Harapan Hidup Orang Asli Papua	-	-	N/A	60	65,55	66,11	N/A	-	65,55	66,11	
5	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	-	-	83,11	82,95	91,24	100	79,07	-	91	100	
6	Persentase Balita Gizi Buruk	-	-	7,5	9	7,8	7,6	0,1	-	8	8	
7	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai API < 1 per 1.000 Penduduk	-	-	N/A	14,28	28,57	28,57	N/A	-	29	29	
8	Rasio Tenaga Medis Tenaga Kesehatan terhadap Populasi	-	-	10,55	10,92	11,02	11,36	10,82	-	11,02	11,36	
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	-	-	N/A	71,42	71,42	71,42	N/A	-	71,42	71,42	
10	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-	-	61,54	57,14	71,42	71,42	42,85	-	71,42	71,42	
11	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	-	-	N/A	71,42	71,42	71,42	N/A	-	71,42	71,42	
12	Cakupan Kartu Papua Sehat	-	-	N/A	50	60	70	N/A	-	60	70	
13	Nilai LAKIP	-	-	N/A	B	B	B	N/A	-	B	B	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-	-	2,1	1,8	1,9	2,0	1,8	-	1,9	2,0	
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	-	-	100	100	100	100	93,33	-	100	100	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	-	-	100	100	100	100	97,14	-	100	100	
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	-	-	70,28	158	145	133	175,82	-	145	133	
6	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	-	-	8,9	36,74	34,64	32,54	8,79	-	34,64	32,54	
7	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	-	-	45	100	100	100	100	-	100	100	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	-	-	95	98,6	98,7	98,8	96,1	-	98,7	98,8	
9	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage)	-	-	50,00	95	95	95	87	-	95	95	
10	Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)	-	-	N/A	85	85	85	N/A	-	85	85	
11	Positive Rate HIV	-	-	2,5	2,21	2,15	2,09	2,3	-	2,15	2,09	
12	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	-	-	80	90	91	92	89	-	91	92	
13	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	-	-	N/A	14,46	20,25	28,35	N/A	-	20,25	28,35	
14	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	-	-	N/A	20	30	40	N/A	-	30	40	
15	Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	-	-	N/A	10	20	40	N/A	-	20	40	
16	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	-	-	8	10,09	7,98	6,31	12,27	-	7,98	6,31	
17	Persentase hipertensi dalam pengendalian	-	-	N/A	25	30	35	N/A	-	30	35	
18	Prevalensi obesitas > 18 Tahun	-	-	N/A	22,1	22,1	22,1	N/A	-	22,1	22,1	
19	Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun	-	-	N/A	7,6	7,6	7,6	N/A	-	7,6	7,6	
20	Persentase Diabetes dalam pengendalian	-	-	N/A	10	12	14	N/A	-	12	14	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	Tahun 2024 (Tahun n-2)	Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tahun 2026 (Tahun n)	Tahun 2027 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun	-	-	N/A	1	1	1	N/A	-	1	1	
22	Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung	-	-	3	3	4	4	4	-	4	4	
23	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	-	-	1	1	1	2	1	-	1	2	
24	Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM	-	-	N/A	14,29	28,58	42,86	N/A	-	28,58	42,86	
25	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	-	-	N/A	10	20	30	N/A	-	20	30	
26	Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	N/A	40	50	60	N/A	-	50	60	
27	Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta	-	-	N/A	1	1	2	N/A	-	1	2	
28	Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	-	-	N/A	40	50	60	N/A	-	50	60	
29	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	-	-	45,4	40	45	50	36,25	-	45	50	
30	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
31	Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	-	-	N/A	100	100	100	N/A	-	100	100	
32	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	-	-	35	23,75	29,62	37,03	24,05	-	29,62	37,03	
33	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-	-	N/A	28,57	42,85	42,85	N/A	-	42,85	42,85	
34	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	-	-	30	20	24	28	26	-	24	28	
35	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	-	-	4	3	4	4	3	-	4	4	
36	Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna	-	-	N/A	67	67	67	N/A	-	67	67	
37	Persentase Puskesmas terakreditasi	-	-	55	96,29	96,29	97,53	92,5	-	96,29	97,53	
38	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	-	-	100	100	100	100	92,14	-	100	100	
39	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	-	-	N/A	3315	3500	4000	N/A	-	3500	4000	
40	Persentase terlaksananya program penunjang perangkat daerah	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	

Berdasarkan data kinerja yang tersaji diatas, untuk Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 (Tahun pelaksanaan awal Renstra Dinas kesehatan 2025-2029) belum dapat dianalisa karena masih dalam proses pelaksanaan sampai pada triwulan III Tahun 2025. Sebagai perbandingan, untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2024 telah dilaksanakan cukup baik, dimana terjadi peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2023 – 2024 yang mengindikasikan terjadi peningkatan status Kesehatan masyarakat. Dari segi ketersediaan akses dan mutu pelayanan Kesehatan, terdapat peningkatan jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas pada Tahun 2024 di Papua Barat walaupun jumlahnya belum mencapai 100%, hal ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan pada periode renstra 2025 -2029 agar target indicator ini dapat terpenuhi dalam menunjang aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan hingga ke wilayah kecamatan. Dalam hal ketersediaan tenaga medis tenaga Kesehatan, terdapat peningkatan rasio tenaga Kesehatan pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya, namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum maksimal terpenuhi, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Ketersediaan obat esensial terutama di fasilitas layanan dasar masih belum merata di semua Puskesmas. Proses pengadaan obat yang terhambat baik karena handling cost yang lebih besar yang disebabkan karena faktor geografis sehingga penyedia e-catalog enggan menyetujui pesanan terutama bila jumlah pesanan sedikit maupun rencana pengadaan yang tidak sesuai rencana kebutuhan obat yang memprioritaskan ketersediaan obat esensial, menjadi permasalahan hampir di semua kabupaten di Provinsi Papua Barat. UPTD Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024, merupakan bentuk keseriusan Dinas Kesehatan dalam peningkatan capaian kinerja terutama pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (bmhp) dan perbekalan Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi merupakan unit

yang sangat penting dengan tugas pokok melaksanakan penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian, pencatatan, pendataan, pengawasan terkait ketersediaan dan penggunaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan.

Dalam hal upaya penerapan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), capaian masih belum merata di semua Kabupaten disebabkan antara lain masih terdapat Kabupaten yang belum memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan Kesehatan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

Indikator kinerja lain yang merupakan prioritas adalah penurunan prevalensi stunting, dimana mengalami penurunan pada Tahun 2024 namun relative kecil yaitu 0,2 % dan masih diatas rata-rata nasional. Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan capaian dan kinerja dalam hal pelaporan dan penginputan data hasil capaian indikator dalam e-PPGBM di tingkat Kabupaten termasuk dukungan sumber daya manusia, dana dan peningkatan tenaga terlatih. Untuk mengatasi stunting, diperlukan komitmen dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Selain indicator sasaran/IKU, Dinas Kesehatan juga memiliki indikator kinerja kunci. Pada Indikator kinerja kunci, mayoritas kinerja mengalami peningkatan atau rasio peningkatan lebih tinggi dibandingkan Tahun sebelumnya. Capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100% dan persentase status aktif kepesertaan JKN mencapai 96%, persentase FKTP terakreditasi juga mengalami peningkatan di Tahun 2024 dibanding sebelumnya dan pencapaian SPM Provinsi cukup tinggi dan akan diupayakan mencapai 100% pada periode renstra berikutnya terutama pada aspek mutu (kualifikasi dan kuantitas jasa/tenaga medis tenaga Kesehatan yang terlibat dalam pencapaian indikator SPM). Beberapa indikator yang masih belum menunjukkan pencapaian optimal seperti Angka kematian Ibu, angka kematian

bayi prevalensi HIV dan API yang masih > 1 per 1000 penduduk, serta indikator lain yang masih belum mencapai target akan ditingkatkan pencapaiannya dengan kolaborasi dan sinergisme bersama Kabupaten dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Papua Barat.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1.1. Faktor pendorong adalah aspek-aspek yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam mencapai target kinerjanya tahun 2024, antara lain:

1. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi baik nasional maupun daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan;
2. Komitmen Pimpinan dan seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terhadap tugas pokok dan fungsinya;
3. Komunikasi, koordinasi dan monitoring kegiatan yang rutin dilakukan di seluruh sub bagian, seksi dan Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
4. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada peraturan yang berlaku;
5. Adanya dukungan sumber dana yang bersifat khusus seperti Dana Otonomi khusus, DAK dan DAU Bidang Kesehatan
6. Kolaborasi dan kemitraan yang sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat dalam mendukung program kesehatan. dan

1.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian kinerja, di antaranya:

1. Keterbatasan anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
2. Masih belum optimalnya asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan, dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan)
3. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan atau keterlambatan implementasi program;
4. Transformasi sistem kesehatan yang mencakup enam pilar belum terimplementasi sepenuhnya dalam proses pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat;
5. Integrasi Layanan Primer (ILP) belum diimplementasikan di seluruh Puskesmas Provinsi Papua Barat;
6. Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan belum merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat menghambat penyediaan layanan kesehatan yang optimal;
7. Rangkap tugas pada tenaga kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan dan memenuhi tanggung jawab administrasi; dan
8. Masih kurangnya perilaku sehat di masyarakat. Mengubah perilaku merupakan tugas yang tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Meskipun beberapa individu mungkin

telah menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), namun tantangan lain adalah kurangnya kesadaran kolektif di masyarakat.

2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada periode renja Tahun 2026 untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

- 2.1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

-  Menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih realistis, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
-  Mengoptimalkan penggunaan data kesehatan dalam menetapkan prioritas program agar intervensi lebih tepat sasaran dan efektif.
-  Memperkuat koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta mitra strategis dalam perencanaan program kesehatan.

- 2.2. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya

-  Mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional sesuai dengan prioritas kesehatan terutama untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
-  Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran berkontribusi pada pencapaian target kinerja.

- 2.3. Peningkatan Pelaksanaan Program dan Layanan Kesehatan

-  Mengoptimalkan sarana, prasarana dan alat kesehatan agar layanan kesehatan lebih merata dan berkualitas.
-  Memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti pencatatan elektronik dan telemedicine, untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan.
-  Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program

kesehatan melalui edukasi dan promosi kesehatan yang lebih masif dan inovatif.

2.4. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

-  Meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi program secara berkala agar kendala dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi dan diatasi lebih cepat.
-  Menyusun indikator kinerja yang lebih terukur dan spesifik agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih akurat.
-  Mengembangkan sistem umpan balik dari masyarakat dan tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program kesehatan.

2.5. Meningkatkan Kolaborasi dan Kemitraan

-  Memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.
-  Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program kesehatan, seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular, dan peningkatan gizi.
-  Mengembangkan kebijakan berbasis kolaborasi guna memastikan keberlanjutan program kesehatan di tingkat daerah dan nasional

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 70.383.362.551,20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 73.899.421.051,46
1	2	1	00:00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 135.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 386.750.000,00
1	2	1	00:00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 105.000.000,00
1	2	1	00:00	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 35.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 36.750.000,00
1	2	1	00:00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 45.000.000,00
X	XX	1	1.01	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Manokwari	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50	Data	Rp -	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Manokwari	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50	Data	Rp 100.000.000,00
X	XX	1	1.01	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Manokwari	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp -	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Manokwari	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting			
NO		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
x	xx	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	Rp -	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 200.000.000,00				
x	xx	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp -	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	
x	xx	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	Rp -	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	Rp 100.000.000,00	
x	xx	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 200.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 415.000.000,00				
x	xx	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	Rp -	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	Rp 65.000.000,00	
x	xx	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp -	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	
x	xx	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	Rp -	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	Rp 100.000.000,00	
x	xx	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp 200.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	
x	xx	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 1.130.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 1.386.500.000,00				
x	xx	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 20.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 21.000.000,00	
x	xx	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 100.000.000,00	
x	xx	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 75.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 78.750.000,00	
x	xx	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 105.000.000,00	
x	xx	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp -	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	
X	XX	01	01:26	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 135.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 141.750.000,00	
X	XX	01	01:26	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kabupaten & Luar Provinsi Papua Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 800.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Kabupaten & Luar Provinsi Papua Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 840.000.000,00	
X	XX	01	01:40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	Rp 760.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	Rp 1.010.000.000,00				
X	XX	01	01:40	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manokwari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Rp 760.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manokwari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Rp 760.000.000,00	
X	XX	01	01:40	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	Rp -	Pengadaan Mebel	Kab. Manokwari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	Rp 100.000.000,00	
X	XX	01	01:40	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 150.000.000,00	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO		Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting	
		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
1		2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12			
X	XX	01	01:55	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 2.123.695.551,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 2.355.563.551,00		
X	XX	01	01:55	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 35.000.000,00	
X	XX	01	01:55	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 400.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 689.850.000,00	
X	XX	01	01:55	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 1.723.695.551,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 1.630.713.551,00	
X	XX	01	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 550.000.000,00	
X	XX	01	02:09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manokwari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	Unit	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manokwari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21	Unit	Rp 100.000.000,00	
X	XX	01	02:09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manokwari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	Unit	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manokwari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	Unit	Rp 100.000.000,00	
X	XX	01	02:09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	Rp -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	Rp 100.000.000,00	
X	XX	01	02:09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 250.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Usia Harapan Hidup	69,79	Tahun	Rp 47.259.930.647,38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Usia Harapan Hidup	69,79	Tahun	Rp 56.544.612.317,42	
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.9 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	Rp 20.993.274.122,96				1.9 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	Rp 20.993.274.122,96	
							Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	145	Per 100.000 Kelahiran hidup	Rp 1.184.094.399,50				145	Per 100.000 Kelahiran hidup	Rp 1.184.094.399,50	
							Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	100	Persen	Rp 9.615.133.400,00				100	Persen	Rp 9.615.133.400,00	
							Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Persen	Rp 3.713.377.206,30				100	Persen	Rp 3.713.377.206,30	
							Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100,00	Persen	Rp 3.704.939.090,05				100,00	Persen	Rp 3.704.939.090,05	
							Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	34,64	Per 1000 kelahiran hidup	Rp 934.094.400,00				34,64	Per 1000 kelahiran hidup	Rp 934.094.400,00	
							Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	100,00	Persen	Rp 150.000.000,00				100,00	Persen	Rp 150.000.000,00	
							Cakupan Kepesertaan JKN	98,70	Persen	Rp 9.345.417.000,40				98,70	Persen	Rp 9.345.417.000,40	
							Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM	28,58	Persen	Rp 822.393.050,00				28,58	Persen	Rp 822.393.050,00	
							Positive Rate HIV	2,15	Persen	Rp 837.995.323,36				2,15	Persen	Rp 837.995.323,36	
							Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	95	Persen	Rp 1.287.995.323,36				95	Persen	Rp 1.287.995.323,36	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO				Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting	
				Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
						Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)	85	Persen	Rp 851.426.400,00			Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)	85	Persen	Rp 851.426.400,00	
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	91	Persen	Rp 862.995.323,36			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	91	Persen	Rp 862.995.323,36	
						Persentase hipertensi dalam pengendalian	30	Persen	Rp 550.000.000,00			Persentase hipertensi dalam pengendalian	30	Persen	Rp 550.000.000,00	
						Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	20	Persen	Rp 6.187.116.595,20			Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer	20	Persen	Rp 6.187.116.595,20	
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	20,25	Persen	Rp 225.000.000,00			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	20,25	Persen	Rp 225.000.000,00	
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	Persen	Rp 1.649.090.502,80			Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	30	Persen	Rp 1.649.090.502,80	
						Prevalensi obesitas > 18 Tahun	22,1	Persen				Prevalensi obesitas > 18 Tahun	22,1	Persen		
						Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun	7,6	Persen				Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun	7,6	Persen		
						Persentase Diabetes dalam pengendalian	12	Persen				Persentase Diabetes dalam pengendalian	12	Persen		
						Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun	1,00	Persen				Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun	1,00	Persen		
						Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung	4,00	Layanan				Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung	4,00	Layanan		
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	1,00	Kab/Kota				Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	1,00	Kab/Kota		
						Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	20,00	Persen				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	20,00	Persen		
						Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Persen				Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Persen		
						Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta	1	Kab/Kota				Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta	1	Kab/Kota		
						Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	50	Persen				Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	50	Persen		
						Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	45	Persen				Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	45	Persen		
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 14.741.462.352,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 21.057.617.292,76	
1	02	02	1.01	0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	Unit	Rp -	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	Rp 5.470.083.913,16	
1	02	02	1.01	0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	Rp 500.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	Rp 2.000.000.000,00	
1	02	02	1.01	0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit.	1	Unit	Rp -	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit.	1	Unit	Rp 1.000.000.000,00	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								Catatan Penting						
2				Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	7				Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana		
1						3	4	5		6					8				10		11		12	
1	2	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit		Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		1	Unit	Rp	7.000.000.000,00		Pengembangan Rumah Sakit		Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		1	Unit	Rp	5.470.083.913,15	
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)		Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)		4	Layanan	Rp	500.000.000,00		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)		Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)		4	Layanan	Rp	1.300.000.000,00	
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		1	Unit	Rp	75.000.000,00		Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		1	Unit	Rp	800.000.000,00	
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	Unit	Rp	1.500.000.000,00		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	Unit	Rp	700.000.000,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Kab. Manokwari	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		1,00	Unit	Rp	500.000.000,00		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Kab. Manokwari	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		1,00	Unit	Rp	2.037.533.368,61	
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Provinsi Papua Barat	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara		2	Unit	Rp	75.000.000,00		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Provinsi Papua Barat	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara		5	Unit	Rp	500.000.000,00	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Provinsi Papua Barat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		2	Unit	Rp	75.000.000,00		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Provinsi Papua Barat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		5	Unit	Rp	500.000.000,00	
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		2	Unit	Rp	200.000.000,00		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		2	Unit	Rp	400.000.000,00	
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Provinsi Papua Barat	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun		0	Unit	Rp	-		Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Provinsi Papua Barat	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun		1	Unit	Rp	1.850.000.000,00	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	Dokumen	Rp	1.996.462.346,00		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	Dokumen	Rp	2.000.000.000,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Kab. Manokwari	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1	Paket	Rp	2.320.000.000,00		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Kab. Manokwari	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1	Paket	Rp	2.500.000.000,00	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting									
NO		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan				Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana		
1		2				3		4		5		6		7			8		9		10		11		12
1	02	02	1.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100	Persen	Rp 23.385.806.945,38			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100	Persen	Rp 25.466.911.100,50				
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi Papua Barat	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1210	Orang	Rp 2.827.630.928,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi Papua Barat	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1210	Orang	Rp 2.817.319.460,00							
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1210	Orang	Rp 1.396.500.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1210	Orang	Rp 2.022.121.750,00							
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	Rp 440.838.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	Rp 750.000.000,00							
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	Rp 75.328.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	Rp 184.094.400,00							
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	Rp 75.328.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00							
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	Rp 157.500.000,00							
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Rp 641.202.375,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Rp 350.000.000,00							
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	Rp -			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00							
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	Rp 381.911.808,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	Rp 401.007.398,40							
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen	Rp 2.085.692.016,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen	Rp 2.189.976.616,80							
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	Rp 125.840.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	Rp 132.132.000,00							
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	Rp 157.041.000,00			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	Rp 164.893.050,00							
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 8.757.540.000,38			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 9.195.417.000,40							
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Rp 870.217.375,00			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Rp 913.728.243,75							
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 659.157.612,00			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 692.115.492,60							

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting			
NO		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
1		2		3	4	5	6	7		8	9	10	11		12				
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp	3.252.508.000,00	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp	3.415.133.400,00	
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	Dokumen	Rp	-	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp	-	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp	125.000.000,00	
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp	232.940.741,00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp	244.587.778,05	
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp	162.843.000,00	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp	170.985.150,00	
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Provinsi Papua Barat	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	Rp	277.047.000,00	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Provinsi Papua Barat	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	Rp	290.899.350,00	
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	Rp	816.241.084,00	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	Rp	550.000.000,00	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Provinsi Papua Barat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	44518	Keluarga	Rp	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Provinsi Papua Barat	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	44518	Keluarga	Rp	249.999.999,50	
1	02	02	4.02	0042	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	636.345.121,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	2.550.000.011,00	
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	284.378.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	400.000.000,00	
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	351.967.115,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	400.000.000,00	
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00	
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	400.000.000,00	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting		
NO		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	250.000.000,00
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	-	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	250.000.000,00
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	-	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	550.000.000,00
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	Rp	313.469.806,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	Persen	Rp	450.000.000,00
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp	313.469.806,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp	450.000.000,00
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	1.440.520.739,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	1.550.000.000,00
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	Rp	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	Rp	150.000.000,00
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	8	Unit	Rp	826.711.598,00	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Provinsi Papua Barat	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	8	Unit	Rp	700.000.000,00
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10	Unit	Rp	613.809.141,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10	Unit	Rp	700.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	14,29	Persen	Rp	252.458.500,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	14,29	Persen	Rp	350.826.153,76
							Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	7,98	Per 1000 Penduduk	Rp	252.458.500,00					Per 1000 Penduduk	Rp	350.826.153,76
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	252.458.500,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	350.826.153,76
1.03	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	252.458.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp	350.826.153,76
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	79,01	Persen	Rp	13.904.475.356,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	79,01	Persen	Rp	14.579.418.355,64
							Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	40	Orang	Rp	23.830.539.958,80					Orang	Rp	23.830.539.958,80
							Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	71,42	Persen							Persen		

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan										Catatan Penting					
Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana				
1				2	3	4		5	6	7				8	9			10		11		12
1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	100	Persen	Rp	-	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	100	Persen	Rp	400.000.000,00					
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2	Orang	Rp	-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2	Orang	Rp	200.000.000,00				
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	2	Orang	Rp	-	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	2	Orang	Rp	200.000.000,00				
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia		Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	Rp	2.554.075.356,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia		Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	Persen	Rp	1.800.000.000,00				
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10	Orang	Rp	2.054.075.356,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10	Orang	Rp	1.500.000.000,00				
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	Rp	500.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00				
1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi		Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	100	Persen	Rp	5.000.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi		Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	100	Persen	Rp	4.000.000.000,00				
1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Luar Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	25	Orang	Rp	5.000.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Luar Provinsi Papua Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	25	Orang	Rp	4.000.000.000,00				
1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		Persentase Terlaksananya Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	100	Persen	Rp	6.350.400.000,00	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		Persentase Terlaksananya Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	100	Persen	Rp	6.567.920.000,00				
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Provinsi Papua Barat	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	14700	Orang	Rp	6.350.400.000,00	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Provinsi Papua Barat	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	14700	Orang	Rp	6.567.920.000,00				
1	02	03	4.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil			100	Persen	Rp	-	Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil			100	Persen	Rp	960.000.000,00				
1	02	03	4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Provinsi Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	5	Orang	Rp	-	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Provinsi Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	5	Orang	Rp	960.000.000,00				
1	02	03	4.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			100	Persen	Rp	-	Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			100	Persen	Rp	150.000.000,00				
1	02	03	4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Provinsi Papua Barat	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	5	Orang	Rp	-	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Provinsi Papua Barat	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	5	Orang	Rp	150.000.000,00				

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO		Rancangan Awal RPKD				Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting						
		Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana								
1	02	03	4,07																
1	02	03	4,07	0002	Pendayagunaan tenaga kesehatan		100	Persen	Rp	-	Pendayagunaan tenaga kesehatan		100	Persen	Rp	501.498.355,64			
1	02	03	4,07		Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	4	Orang	Rp	-	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	4	Orang	Rp	501.498.355,64	
1	02	03	4,08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP		100	Persen	Rp	-	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP		100	Persen	Rp	200.000.000,00			
1	02	03	4,08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Provinsi Papua Barat	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	1	Dokumen	Rp	-	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Provinsi Papua Barat	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	1	Dokumen	Rp	200.000.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100	Persen	Rp	350.000.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100	Persen	Rp	364.563.405,36	
							Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100	Persen	Rp	350.000.000,00			Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100	Persen	Rp	364.563.405,36	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	Persen	Rp	213.829.189,00	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	Persen	Rp	224.520.648,45	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Provinsi Papua Barat	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	3	Sarana	Rp	213.829.189,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Provinsi Papua Barat	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	3	Sarana	Rp	224.520.648,45	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100	Persen	Rp	136.170.811,00	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100	Persen	Rp	140.042.756,91	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Papua Barat	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	Rp	136.170.811,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Papua Barat	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	Rp	140.042.756,91	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	4	Kabupaten	Rp	800.000.006,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	4	Kabupaten	Rp	822.453.070,66	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	300.000.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	150.000.000,00	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	6,00	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	300.000.011,00	
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Rp	-	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan					Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Rp	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 500.000.000,00	-	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 372.453.059,66	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	Rp 500.000.000,00	-	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	Rp 372.453.059,66	
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			100	Persen	Rp	-	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			100	Persen	Rp	-
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	0	Dokumen	Rp	-	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	0	Dokumen	Rp	-
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN		Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	71,42	Persen	Rp	-	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN		Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	71,42	Persen	Rp 519.750.000,00	
1	02	07	3.01		Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta		Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna	67	Persen	Rp	-	Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta		Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna	67	Persen	Rp 519.750.000,00	
							Persentase Puskesmas terakreditasi	96,29	Persen					Persentase Puskesmas terakreditasi	96,29	Persen		
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	3	Unit	Rp	-	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	3	Unit	Rp 204.750.000,00	
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	3	Unit	Rp	-	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	3	Unit	Rp 157.500.000,00	
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	3	Unit	Rp	-	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Provinsi Papua Barat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	3	Unit	Rp 157.500.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	13,09	Persen	Rp 3.000.000.000,00	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	13,09	Persen	Rp 3.126.687.538,61	
							Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)	100	Persen	Rp 3.000.000.000,00	-			Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)	100	Persen	Rp 3.126.687.538,61	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 3.000.000.000,00	-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 3.126.687.538,61	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	Rp 3.000.000.000,00	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	Rp 3.126.687.538,61	
1	02	02			Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua		Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	65,56	Tahun	Rp	-			Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua	65,56	Tahun	Rp 52.500.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	3500	Orang	Rp	-	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat	3500	Orang	Rp 52.500.000.000,00	
1	02	02	1.02		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp	-	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	Persen	Rp 52.500.000.000,00	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Provinsi Papua Barat	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	3500	Orang	Rp	-	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Provinsi Papua Barat	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	3500	Orang	Rp 52.500.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Papua Barat

No					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp 1.700.000.000,00	
							Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		
							Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		
							Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi		
							Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		
							Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
							Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar		
							Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pegunungan Arfak	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 100.000.000,00	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 100.000.000,00	
1	2	02	01:01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 1.300.000.000,00	
1	2	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Manokwari	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Rp 1.000.000.000,00	
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Manokwari	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 300.000.000,00	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

No					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 300.000.000,00	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Kab. Teluk Wondama dan Kabupaten lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Rp 300.000.000,00	Terdapat program Papua Barat Sehat sehingga akan mengakomodir semua Kabupaten sesuai dengan Pergub dan Juknis yang mengatur
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Terseleenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 45.000.000,00	
X	XX	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 45.000.000,00	
X	XX	01	1,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Manokwari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 45.000.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, serta prioritas Presiden RI atau yang disebut dengan Astacita, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor kesehatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang menggunakan konsep Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir yang mencakup pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, maka kesehatan menjadi Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan Astacitanya, Presiden RI menetapkan Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/*Quick Win*, ada lima kegiatan prioritas utama yaitu:

1. Pemberian Makan bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita;
2. Penguatan Ekosistem pendukung pemberian Makan Bergizi;
3. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;

4. Penuntasan TBC;
5. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Provinsi/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses.

Untuk mendukung RPJPN, Astacita, PHTC, maka harus ada sinkronisasi perencanaan pusat dengan daerah yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup, dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat, melalui:
 1. Penurunan kematian ibu dan anak;
 2. Pencegahan dan penurunan stunting;
 3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia serta KB-kespro; dan
 4. Penguatan pemeriksaan kesehatan gratis.
2. Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi, diarahkan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta

meningkatkan pemahaman Masyarakat dalam perbaikan gizi, melalui:

1. Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita; dan
2. Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi.
3. Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, diarahkan pada menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini factor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta Pembangunan berwawasan kesehatan, melalui:
 1. Penuntasan TBC;
 2. Eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasis;
 3. Pengendalian penyakit menular lainnya;
 4. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan Upaya kesehatan jiwa;
 5. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM; dan
 6. Penyehatan lingkungan.
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola, diarahkan pada melindungi penduduk dari ancaman kegawatdaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon secara efektif dan cepat, melalui:

1. Investasi pelayanan kesehatan primer;
 2. RS lengkap berkualitas di Provinsi/kabupaten, pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses;
 3. Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;
 4. Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan dengan indikatornya;
dan
 5. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan.
5. Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan, diarahkan pada meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan yaitu:
1. Penguatan surveilans, penendalian KLB/wabah dan penanganan bencana;
 2. Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi anti mikroba; dan
 3. Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi.

Kesehatan untuk Semua akan dicapai dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui kelima program tersebut di atas. Selanjutnya peran daerah yang diharapkan dalam

Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penterjemahan kebijakan, indikator dan target prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah;
2. Pengawasan pelaksanaan berbagai kebijakan/intervensi prioritas nasional di daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
3. Penguatan koordinasi lintas OPD/sektor di daerah untuk pencapaian berbagai target prioritas;
4. Pelibatan swasta, organisasi non Pemerintah, akademisi, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan Masyarakat secara luas untuk memobilisasi sumber daya, meningkatkan *awareness* dan kontribusi pada pencapaian target prioritas Pembangunan;
5. Penguatan data untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran lebih detail tujuan dan sasaran arah pembangunan daerah Provinsi Papua Barat sesuai RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tujuan yang dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2025 – 2029. Dengan visi yaitu **“Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat dan Mandiri”**, dan Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah yang inklusif;
3. Membangun pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas;
5. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah;
6. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance;
7. Optimalisasi otonomi khusus untuk mensejahterakan Orang Asli Papua di Papua Barat.

Sebagai implementasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tersebut diterjemahkan dalam tataran pelaksanaan di perangkat daerah Dinas Kesehatan Papua Barat 2025 – 2029 dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sebagai perangkat daerah teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat juga merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat 2025 - 2029. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua

Barat 2025 – 2029 urusan kesehatan termaktub pada :

1. Misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial”, Tujuan ke-1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial” dan Sasaran ke-1 “Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan” dengan indikator kinerja sasaran RPJMD yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) dan Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
2. Misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial”, Tujuan ke-1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial” dan Sasaran ke-2 “Menurunnya Angka Prevalensi Stunting” dengan indikator kinerja sasaran RPJMD yaitu Prevalensi stunting.
3. Misi ke-7 “Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Orang Asli Papua di Papua Barat”, Tujuan ke-7 “Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP” dan Sasaran ke-23 “Meningkatnya akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan OAP” dengan indikator kinerja sasaran RPJMD yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua.

Dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat di atas, maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

Tujuan 1 (T1) : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Menurunkan Angka Prevalensi Stunting dan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP

Tujuan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu :

Sasaran 1 (S.1) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah

Sasaran 2 (S.2) : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas

	Pelayanan Kesehatan Secara Merata
Sasaran 3 (S.3)	: Menurunkan Angka Kesakitan Malaria
Sasaran 4 (S.4)	: Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata
Sasaran 5 (S.5)	: Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran 6 (S.6)	: Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat
Sasaran 7 (S.7)	: Meningkatnya Akreditasi pelayanan Kesehatan
Sasaran 8 (S.8)	: Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin
Sasaran 9 (S.9)	: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP

Tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Utama Kesehatan untuk Semua Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)		(02)		(03)		(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perlindungan Sosial”															
Tujuan ke-1 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berketahanan Sosial”															
S1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	T1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		T1	Usia Harapan Hidup (UHH)	68.47	69.45	69.79	70.13	70.47	70.81	71.16		
						Persentase kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (%)	14.29	14.29	14.29	14.29	42.86	57.14	71.42		
				S.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	S.1.1	Nilai LAKIP	B	B	B	B	B	B	B	
				S.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	S.1.2	Persentase Kecamatan Memiliki 1 Puskesmas	79.07	82.95	91.24	100	100	100	100	
				S.1.3	Menurunkan Angka Kesakitan Malaria	S.1.3	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai API < 1 per 1.000 Penduduk	14.28	14.28	28.57	28.57	57.14	71.43	85.71	
				S.1.4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	S.1.4	Rasio Tenaga Medis Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (per 1.000 Penduduk)	10.82	10.92	11.02	11.36	11.9	12.44	12.5	
				S.1.5	Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	S.1.5	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	71.42	71.42	71.42	71.42	85.71	100	100	
				S.1.6	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	S.1.6	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	42.85	57.14	71.42	71.42	85.71	100	100	
S2	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	T2	Menurunkan Angka Prevalensi Stunting		T2	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna	71.42	71.42	71.42	71.42	85.71	100	100		
				S.2.1	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gisi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin	S.2.1	Persentase Balita Gizi Buruk	10	9	7.8	7.6	7.4	7.2	7	
Misi ke-7 “Optimalisasi Otonomi Khusus untuk Orang Asli Papua di Papua Barat”															
Tujuan ke-7 “Mewujudkan SDM OAP yang unggul, berkarakter, dan sejahtera melalui pembangunan inklusif berbasis kearifan lokal dan data terpilah OAP”															
S23	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP	T3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP		T3	Usia Harapan Hidup Orang Asli Papua	0	60	65,55	66,11	66,68	67,25	67,82		
				S.3.1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP	S.3.1	Cakupan Kartu Papua Sehat OAP	N.A	50	60	70	80	90	100	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pembangunan kesehatan periode 2025-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2		4		5
1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.1	Peningkatan tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan	1.1.1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan pada daerah sulit akses (3 T)	
				1.1.2	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	
				1.1.3	Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	
				1.1.4	Perluasan Cakupan dan Pengembangan Layanan Telemedicine dan Pembangunan Puskesmas di Distrik Tanpa Puskesmas	
				1.1.5	Percepatan Akreditasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				1.1.6	Pengembangan Layanan Unggulan di RS Berdasarkan Kondisi Epidemiologis dan Kebutuhan Masyarakat Setempat	
				1.1.7	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan RS Rujukan dan Layanan Kesehatan Pada Penduduk Berdampak Bencana	
				1.1.8	Perluasan Layanan dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersenegri Dengan Program Lain Yang Melengkapi Paket Manfaat JKN	
				1.1.9	Peningkatan kualitas dan sanitasi kesehatan lingkungan, fasilitas penyedia makanan dan minuman, dan pengelolaan limbah medis sesuai standar	

OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2	4		5
		1,2 Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses.	1.2.1	Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Melalui Afirmasi Pendayagunaan Lulusan Tenaga Kesehatan Terutama Untuk OAP Dalam Bentuk Ikatan Dinas, Penugasan Khusus dan Program Lainnya	
			1.2.2	Perluasan Cakupan Beasiswa Untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan Bagi OAP Disertai Dengan Penempatan Wajib Pasca Kelulusan	
			1.2.3	Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	
			1.2.4	Pengembangan Skema Insentif khusus Dan Penghargaan Bagi Tenaga medis dan tenaga Kesehatan Yang Berbasis Beban Kerja Dan Kondisi Geografis Lokasi Penugasan	
			1.2.5	Penyediaan fasilitas pendidikan kesehatan bagi penyediaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi tenaga medis tenaga kesehatan	
		1,3 Meningkatkan Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	1.3.1	Penguatan pendampingan dan koordinasi serta advokasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	
			1.3.2	Peningkatan Penemuan Kasus Melalui Deteksi Dini Dan Penemuan Kasus Penyakit Menular Secara Aktif Maupun Pasif	
			1.3.3	Peningkatan Penangan Kasus dan terapi Segera Dan Tepat Serta Pemantauan Pengobatan	
			1.3.4	Penguatan Sistem Surveilans Terpadu Berbasis Laboratorium	
		1,4 Peningkatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	1.4.1	Percepatan Akreditasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.4.2	Peningkatan status akreditasi menjadi Paripurna pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
		1,5 Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif	1.5.1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan Pembudayaan Masyarakat Hidup Sehat	
			1.5.2	Penguatan Regulasi Gerakan Masyarakat Untuk Membudayakan Hidup Sehat (Germas) Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat Serta Keterjangkauan Pilihan Pangan Sehat	
			1.5.3	Peningkatan Kemandirian Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menyelenggarakan UKBM Terutama Posyandu Dan Posbindu PTM	
			1.5.4	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
		1,6 Peningkatan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan dan Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan	1.6.1	Perbaikan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Dan Vaksin Untuk Mencakupi Kebutuhan Seluruh Fasilitas Kesehatan termasuk obat tradisional	
			1.6.2	Peningkatan Kualitas Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Di Tingkat Provinsi	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD		ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1		2		4		5
2	Penurunan Angka Prevalensi Stunting	2,1	Peningkatan gizi, melalui pelaksanaan deteksi dini masalah gizi dan pemberian tata laksanaanya; Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung; Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dan, Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak	2.1.1	Penguatan Surveilans Gizi Di Tingkat Kabupaten/Kota	
				2.1.2	Penguatan Pendidikan Gizi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Keluarga	
				2.1.3	Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pembinaan Keluarga Sejahtera Dalam Pengasuhan 1000 HPK	
				2.1.4	Peningkatan sanitasi lingkungan khususnya dalam mendukung penurunan prevalensi stunting	
				2.1.5	Penguatan layanan dasar Puskesmas, Pustu dan Posyandu bagi Ibu dan Anak dalam mendukung penurunan prevalensi stunting	
3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP	3,1	Peningkatan tata kelola serta pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi OAP dan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan/ pengobatan gratis dan percepatan perbaikan gizi masyarakat, serta percepatan penurunan stunting bagi OAP	3.1.1	Penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, termasuk penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan pada daerah sulit akses (3 T) dengan sasaran prioritas bagi OAP	
				3.1.2	Pemberian layanan dan pengobatan gratis bagi masyarakat OAP khususnya masyarakat tidak mampu lewat skema Papua Barat Sehat	
				3.1.3	Perluasan Layanan dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bersinergi dengan Program Papua Barat Sehat	
				3.1.4	Pemberian intervensi spesifik dan sensitif bagi Ibu dan Anak OAP dalam mendukung penurunan prevalensi stunting	
				3.1.5	Penguatan Pendidikan Gizi Melalui Diversifikasi Pangan Lokal bagi masyarakat OAP	

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2026 periode Renstra tahun 2025-2029, maka strategi dan arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program dan kegiatan tersebut kemudian diselaraskan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan sektor kesehatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Papua Barat tahun 2025 -2029 dengan memperhatikan skala prioritas serta tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2025-2029.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2026 yaitu Pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2026; Pencapaian SPM Kesehatan; Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; Penurunan Prevalensi stunting; dan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua Dinas Kesehatan melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program/kegiatan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 202.707.731.848,91				Rp 230.637.334.647,91
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 202.707.731.848,91				Rp 230.637.334.647,91
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	Rp 73.899.421.051,46			100 Persen	Rp 77.594.392.104,03
1	2	1	00:00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	Rp 386.750.000,00			100 Persen	Rp 774.478.552,57
1	2	1	00:00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	Rp 200.000.000,00
1	2	1	00:00	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 36.750.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1 Dokumen	Rp 200.000.000,00
1	2	1	00:00	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manokwari	1 Laporan	Rp 45.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	Rp 164.478.552,57
X	XX	1	1.01	8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	50 Data	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		55 Data	Rp 105.000.000,00
X	XX	1	1.01	10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	Rp 105.000.000,00
x	xx	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	Rp 67.595.607.500,46			100 Persen	Rp 69.543.107.500,46
x	xx	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manokwari	365 Orang/ Bulan	Rp 67.358.857.500,25	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi		370 Orang/ Bulan	Rp 69.123.107.500,46
x	xx	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	Rp 220.000.000,00
x	xx	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Manokwari	1 Laporan	Rp 36.750.000,21	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1 Laporan	Rp 200.000.000,00
x	xx	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	Rp 200.000.000,00			100 Persen	Rp 210.000.000,00
x	xx	01	1.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Dokumen	Rp 105.000.000,00
x	xx	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manokwari	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1 Laporan	Rp 105.000.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027																																				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif																																		
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
x	xx	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	Persen	Rp	415.000.000,00						100	Persen	Rp	550.000.000,00																													
x	xx	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	65.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Paket	Rp	100.000.000,00																													
x	xx	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp	100.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Dokumen	Rp	100.000.000,00																													
x	xx	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	100	Orang	Rp	100.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		102	Orang	Rp	150.000.000,00																													
x	xx	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Dokumen	Rp	200.000.000,00																													
x	xx	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	Persen	Rp	1.386.500.000,00						100	Persen	Rp	2.175.000.000,00																													
x	xx	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	21.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Paket	Rp	75.000.000,00																													
x	xx	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	100.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Paket	Rp	250.000.000,00																													
x	xx	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	78.750.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Paket	Rp	150.000.000,00																													
x	xx	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	105.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH); Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Paket	Rp	150.000.000,00																													
x	xx	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp	100.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Dokumen	Rp	150.000.000,00																													
X	XX	01	01:26	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp	141.750.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Laporan	Rp	200.000.000,00																													
X	XX	01	01:26	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Provinsi Papua Barat	1	Laporan	Rp	840.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Laporan	Rp	1.200.000.000,00																													
X	XX	01	01:40		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	Rp	1.010.000.000,00						100	Persen	Rp	1.022.500.000,00																													
X	XX	01	01:40	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp	760.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Unit	Rp	760.000.000,00																													
X	XX	01	01:40	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	100.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Paket	Rp	105.000.000,00																													
X	XX	01	01:40	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp	150.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Unit	Rp	157.500.000,00																													
X	XX	01	01:55		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	Rp	2.355.563.551,00						100	Persen	Rp	2.541.806.051,00																													
X	XX	01	01:55	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp	35.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Laporan	Rp	36.750.000,00																													
X	XX	01	01:55	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp	689.850.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Laporan	Rp	824.342.500,00																													
X	XX	01	01:55	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp	1.630.713.551,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Laporan	Rp	1.680.713.551,00																													
X	XX	01	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	Rp	550.000.000,00						100	Persen	Rp	777.500.000,00																													
X	XX	01	02:09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Manokwari	21	Unit	Rp	100.000.000,00				Dana Bagi Hasil (DBH)		21	Unit	Rp	205.000.000,00																													
X	XX	01	02:09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Manokwari	59	Unit	Rp	100.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		59	Unit	Rp	205.000.000,00																													
X	XX	01	02:09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Manokwari	100	Unit	Rp	100.000.000,00				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		105	Unit	Rp	105.000.000,00																													
X	XX	01	02:09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp	250.000.000,00						1	Unit	Rp	262.500.000,00																													

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia Harapan Hidup		69,79	Tahun	Rp 56.544.612.284,42			70,13	Tahun	Rp 67.288.088.618,46
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		1.9 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	Rp 20.993.274.122,96			2.0 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	Rp 29.297.295.926,91
						Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		145	Per 100.000 Kelahiran hidup	Rp 1.184.094.399,50			133	Per 100.000 Kelahiran hidup	Rp 1.272.299.120,00
						Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi		100	Persen	Rp 9.615.133.400,00			100	Persen	Rp 10.595.890.070,00
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		100	Persen	Rp 3.713.377.206,30			100	Persen	Rp 4.039.912.039,62
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		100,00	Persen	Rp 3.704.939.090,05			100,00	Persen	Rp 3.862.092.032,05
						Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		34,64	Per 1000 kelahiran hidup	Rp 934.094.400,00			32,54	Per 1000 kelahiran hidup	Rp 1.009.799.120,00
						Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia		100,00	Persen	Rp 150.000.000,00			100,00	Persen	Rp 177.615.661,00
						Cakupan Kepesertaan JKN		98,70	Persen	Rp 9.345.417.000,40			98,80	Persen	Rp 9.812.687.850,42
						Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM		28,58	Persen	Rp 822.393.050,00			42,86	Persen	Rp 863.512.702,50
						Positive Rate HIV		2,15	Persen	Rp 837.995.323,36			2,09	Persen	Rp 879.895.089,53
						Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)		95	Persen	Rp 1.287.995.323,36			95	Persen	Rp 1.352.395.089,53
						Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)		85	Persen	Rp 851.426.400,00			85	Persen	Rp 893.997.720,00
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		91	Persen	Rp 862.995.323,36			92	Persen	Rp 906.145.089,53
						Persentase hipertensi dalam pengendalian		30	Persen	Rp 550.000.000,00			35	Persen	Rp 577.500.000,00
						Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer		20	Persen	Rp 6.187.116.595,20			40	Persen	Rp 6.545.588.085,96
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional		20,25	Persen	Rp 225.000.000,00			28,35	Persen	Rp 236.250.000,00
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		30	Persen	Rp 1.649.090.502,80			40	Persen	Rp 1.780.660.688,94
						Prevalensi obesitas > 18 Tahun		22,1	Persen				22,1	Persen	
						Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun		7,6	Persen				7,6	Persen	
						Persentase Diabetes dalam pengendalian		12	Persen				14	Persen	
						Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun		1,00	Persen				1,00	Persen	
						Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung		4,00	Layanan				4,00	Layanan	
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat		1,00	Kab/Kota				2,00	Kab/Kota	
						Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		20,00	Persen				30,00	Persen	
						Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		50	Persen				60	Persen	
						Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta		1	Kab/Kota				2	Kab/Kota	
						Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar		50	Persen				60	Persen	
						Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar		45	Persen				50	Persen	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	26.527.701.194,92			100	Persen	Rp	35.573.444.352,47
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	5.470.083.913,16	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Unit	Rp	8.645.767.157,72
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	2.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Unit	Rp	3.100.000.000,00
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	1.000.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Unit	Rp	1.200.000.000,00
1	2	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	10.940.167.826,31	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Unit	Rp	17.291.534.315,43
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Provinsi Papua Barat	4	Layanan	Rp	1.300.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		4	Layanan	Rp	1.365.000.000,00
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	800.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Unit	Rp	840.000.000,00
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Unit	Rp	1.000.000.000,00
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp	2.037.533.368,61	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1	Unit	Rp	2.081.910.037,04
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Provinsi Papua Barat	5	Unit	Rp	500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		7	Unit	Rp	525.000.000,00
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	5	Unit	Rp	500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		7	Unit	Rp	525.000.000,00
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Provinsi Papua Barat	2	Unit	Rp	400.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		2	Unit	Rp	420.000.000,00
1	02	02	1.00	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	1.850.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Unit	Rp	2.000.000.000,00
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	2.000.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	2.100.000.000,00
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	2.500.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Paket	Rp	3.125.000.000,00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	25.466.911.101,50			100	Persen	Rp	26.902.144.286,00
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1210	Orang	Rp	2.817.319.460,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1331	Orang	Rp	3.099.051.406,00
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1210	Orang	Rp	2.022.121.750,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1331	Orang	Rp	2.095.133.825,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 750.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi		1	Dokumen	Rp 787.500.000,00
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 184.094.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 222.299.120,00
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 177.615.661,00
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 157.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 165.375.000,00
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 367.500.000,00
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 157.500.000,00
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 401.007.398,40	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 421.057.768,32
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 2.189.976.616,80	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 2.299.475.447,64
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 132.132.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 138.738.600,00
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 164.893.050,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 173.137.702,50
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 9.195.417.000,40	Pajak Rokok; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Dokumen	Rp 9.655.187.850,42
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 913.728.243,75	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;		1	Dokumen	Rp 959.414.655,94
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 692.115.492,60	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 726.721.267,23
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 3.415.133.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1	Dokumen	Rp 3.585.890.070,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 157.500.000,00
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 125.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1	Dokumen	Rp 131.250.000,00
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp 244.587.778,05	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Unit	Rp 256.817.166,95
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 170.985.150,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 179.534.407,50
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Provinsi Papua Barat	1	Paket	Rp 290.899.350,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Paket	Rp 305.444.317,50
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 550.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 577.500.000,00
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Provinsi Papua Barat	44518	Keluarga	Rp 249.999.999,50	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		44518	Keluarga	Rp 262.500.000,00
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp 2.550.000.000,00			100	Persen	Rp 2.677.500.000,00
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 420.000.000,00
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 420.000.000,00
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 315.000.000,00
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 420.000.000,00
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 250.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 262.500.000,00
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 250.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 262.500.000,00
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 550.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 577.500.000,00
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		100	Persen	Rp 450.000.000,00			100	Persen	Rp 472.500.000,00
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 450.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;		1	Dokumen	Rp 472.500.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027																																				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif																																		
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			100	Persen	Rp	1.550.000.000,00					100	Persen	Rp	1.662.500.000,00																													
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	1	Unit	Rp	157.500.000,00																																	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	8	Unit	Rp	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	9	Unit	Rp	770.000.000,00																																	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	10	Unit	Rp	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	12	Unit	Rp	735.000.000,00																																	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria		14,29	Persen	Rp	350.826.153,76		14,29	Persen	Rp	417.483.122,98																																	
						Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk		7,98	Per 1000 Penduduk	Rp	350.826.153,76		7,98	Per 1000 Penduduk	Rp	417.483.122,98																																	
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	350.826.153,76		100	Persen	Rp	417.483.122,98																																	
1.03	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	350.826.153,76	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	417.483.122,98																																	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar		79,01	Persen	Rp	14.579.418.355,64		79,01	Persen	Rp	17.349.507.843,21																																	
						Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya		40	Orang	Rp	23.830.539.958,80		40	Orang	Rp	23.830.539.958,80																																	
						Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		71,42	Persen				71,42	Persen																																			
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM Provinsi	Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM Provinsi		100	Persen	Rp	400.000.000,00		100	Persen	Rp	1.400.000.000,00																																	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi Papua Barat	2	Orang	Rp	200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5	Orang	Rp	700.000.000,00																																	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Provinsi Papua Barat	2	Orang	Rp	200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5	Orang	Rp	700.000.000,00																																	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia		100	Persen	Rp	1.800.000.000,00		100	Persen	Rp	2.072.500.000,00																																	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Dalam & Luar Provinsi Papua Barat	10	Orang	Rp	1.500.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	11	Orang	Rp	1.600.000.000,00																																	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	472.500.000,00																																	
1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua		100	Persen	Rp	4.000.000.000,00		100	Persen	Rp	4.250.000.000,00																																	
1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Luar Provinsi Papua Barat	25	Orang	Rp	4.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	27	Orang	Rp	4.250.000.000,00																																	
1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		100	Persen	Rp	6.567.920.000,00		100	Persen	Rp	6.700.316.000,00																																	
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua vane terintegrasi denean Proqram JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Provinsi Papua Barat	14700	Orang	Rp	6.567.920.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	15435	Orang	Rp	6.700.316.000,00																																	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8		10
1	02	03	4,04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil			100	Persen	Rp 960.000.000,00				
1	02	03	4,04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Provinsi Papua Barat	5	Orang	Rp 960.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	8	Orang	Rp 1.500.000.000,00
1	02	03	4,05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			100	Persen	Rp 150.000.000,00		100	Persen	Rp 200.000.000,00
1	02	03	4,05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan masyarakat hukum adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan masyarakat hukum adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Provinsi Papua Barat	5	Orang	Rp 150.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	8	Orang	Rp 200.000.000,00
1	02	03	4,07		Pendayagunaan tenaga kesehatan			100	Persen	Rp 501.498.355,64		100	Persen	Rp 976.691.843,21
1	02	03	4,07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Provinsi Papua Barat	4	Orang	Rp 501.498.355,64	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	8	Orang	Rp 976.691.843,21
1	02	03	4,08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP			100	Persen	Rp 200.000.000,00		100	Persen	Rp 250.000.000,00
1	02	03	4,08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp 250.000.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan		100	Persen	Rp 364.563.405,36		100	Persen	Rp 382.791.575,63
						Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha		100	Persen	Rp 364.563.405,36		100	Persen	Rp 382.791.575,63
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha		100	Persen	Rp 224.520.648,45		100	Persen	Rp 238.830.104,87
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	Provinsi Papua Barat	3	Sarana	Rp 224.520.648,45	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3	Sarana	Rp 238.830.104,87
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		100	Persen	Rp 140.042.756,91		100	Persen	Rp 143.961.470,76
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Papua Barat	1	Sarana	Rp 140.042.756,91	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Sarana	Rp 143.961.470,76
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		4	Kabupaten	Rp 822.453.065,66		4	Kabupaten	Rp 863.575.722,65
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp 150.000.000,00		100	Persen	Rp 150.000.000,00
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp 300.000.006,00		100	Persen	Rp 157.500.010,00
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0	Dokumen	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Dokumen	Rp	157.500.000,00
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	372.453.059,66		100	Persen	Rp	300.000.000,00
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	372.453.059,66	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			100	Persen	Rp	-		100	Persen	Rp	256.075.712,65
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Provinsi Papua Barat	0	Dokumen	Rp	-	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	256.075.712,65
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna		71,42	Persen	Rp	519.750.000,00		71,42	Persen	Rp	545.737.500,00
1	02	07	3.01		Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna		67	Persen	Rp	519.750.000,00		67	Persen	Rp	545.737.500,00
						Persentase Puskesmas terakreditasi		96,29	Persen				96,29	Persen		
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Provinsi Papua Barat	3	Unit	Rp	204.750.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5	Unit	Rp	214.987.500,00
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Provinsi Papua Barat	3	Unit	Rp	157.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5	Unit	Rp	165.375.000,00
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Provinsi Papua Barat	3	Unit	Rp	157.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5	Unit	Rp	165.375.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		13,09	Persen	Rp	3.126.687.538,61		13,09	Persen	Rp	3.720.758.170,95
						Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)		100	Persen	Rp	3.126.687.538,61		100	Persen	Rp	3.720.758.170,95
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	3.126.687.538,61		100	Persen	Rp	3.720.758.170,95
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	3.126.687.538,61	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	3.720.758.170,95
1	02	02				Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua		65,56	Tahun	Rp	52.500.000.000,00		65,56	Tahun	Rp	62.475.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat		3500	Orang	Rp	52.500.000.000,00		4000	Orang	Rp	62.475.000.000,00
1	02	02	1.02		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	52.500.000.000,00		100	Persen	Rp	62.475.000.000,00
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Provinsi Papua Barat	3500	Orang	Rp	52.500.000.000,00	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	4000	Orang	Rp	62.475.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

4.1. Rencana Kerja

Rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2026 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Tabel ini berisi program pembangunan daerah (program prioritas daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

4.2. Pendanaan

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp 230.637.334.677,91 termasuk untuk gaji dan tunjangan. Seluruh program/kegiatan tersebut diharapkan bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, Pajak Rokok dan lain-lain.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026
Provinsi Papua Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 202.707.731.848,91				Rp 230.637.334.647,91
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					Rp 202.707.731.848,91				Rp 230.637.334.647,91
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	Rp 73.899.421.051,46			100	Persen	Rp 77.594.392.104,03
1	2	1	00:00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 386.750.000,00			100	Persen	Rp 774.478.552,57
1	2	1	00:00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1	Dokumen	Rp 200.000.000,00
1	2	1	00:00	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 36.750.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1	Dokumen	Rp 200.000.000,00
1	2	1	00:00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 45.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1	Laporan	Rp 164.478.552,57
X	XX	1	1.01	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	50	Data	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	55	Data	Rp 105.000.000,00
X	XX	1	1.01	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1	Dokumen	Rp 105.000.000,00
x	xx	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 67.595.607.500,46			100	Persen	Rp 69.543.107.500,46
x	xx	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manokwari	365	Orang/ Bulan	Rp 67.358.857.500,25	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua- Kesehatan dan Perbaikan Gizi; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua- Kesehatan dan Perbaikan Gizi	370	Orang/ Bulan	Rp 69.123.107.500,46
x	xx	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 200.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1	Dokumen	Rp 220.000.000,00
x	xx	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 36.750.000,21	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1	Laporan	Rp 200.000.000,00
x	xx	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	Rp 200.000.000,00			100	Persen	Rp 210.000.000,00
x	xx	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1	Dokumen	Rp 105.000.000,00
x	xx	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)	1	Laporan	Rp 105.000.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
x	xx	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	Persen	Rp 415.000.000,00			100	Persen	Rp 550.000.000,00
x	xx	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp 65.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Paket	Rp 100.000.000,00
x	xx	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Dokumen	Rp 100.000.000,00
x	xx	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	100	Orang	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		102	Orang	Rp 150.000.000,00
x	xx	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Dokumen	Rp 200.000.000,00
x	xx	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	Persen	Rp 1.386.500.000,00			100	Persen	Rp 2.175.000.000,00
x	xx	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp 21.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Paket	Rp 75.000.000,00
x	xx	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Paket	Rp 250.000.000,00
x	xx	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp 78.750.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Paket	Rp 150.000.000,00
x	xx	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp 105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH); Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Paket	Rp 150.000.000,00
x	xx	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Dokumen	Rp 100.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Dokumen	Rp 150.000.000,00
X	XX	01	01:26	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 141.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Laporan	Rp 200.000.000,00
X	XX	01	01:26	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Provinsi Papua Barat	1	Laporan	Rp 840.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Laporan	Rp 1.200.000.000,00
X	XX	01	01:40		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	Rp 1.010.000.000,00			100	Persen	Rp 1.022.500.000,00
X	XX	01	01:40	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp 760.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Unit	Rp 760.000.000,00
X	XX	01	01:40	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Paket	Rp 105.000.000,00
X	XX	01	01:40	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp 150.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Unit	Rp 157.500.000,00
X	XX	01	01:55		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	Rp 2.355.563.551,00			100	Persen	Rp 2.541.806.051,00
X	XX	01	01:55	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 35.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		1	Laporan	Rp 36.750.000,00
X	XX	01	01:55	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 689.850.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Laporan	Rp 824.342.500,00
X	XX	01	01:55	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Laporan	Rp 1.630.713.551,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1	Laporan	Rp 1.680.713.551,00
X	XX	01	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	Rp 550.000.000,00			100	Persen	Rp 777.500.000,00
X	XX	01	02:09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Manokwari	21	Unit	Rp 100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		21	Unit	Rp 205.000.000,00
X	XX	01	02:09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Manokwari	59	Unit	Rp 100.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		59	Unit	Rp 205.000.000,00
X	XX	01	02:09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Manokwari	100	Unit	Rp 100.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		105	Unit	Rp 105.000.000,00
X	XX	01	02:09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp 250.000.000,00			1	Unit	Rp 262.500.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Usia Harapan Hidup		69,79	Tahun	Rp 56.544.612.284,42			70,13	Tahun	Rp 67.288.088.618,46
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		1.9 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	Rp 20.993.274.122,96			2.0 : 1000	Rasio TT : 1000 Penduduk	Rp 29.297.295.926,91
						Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		145	Per 100.000 Kelahiran hidup	Rp 1.184.094.399,50			133	Per 100.000 Kelahiran hidup	Rp 1.272.299.120,00
						Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi		100	Persen	Rp 9.615.133.400,00			100	Persen	Rp 10.595.890.070,00
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		100	Persen	Rp 3.713.377.206,30			100	Persen	Rp 4.039.912.039,62
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi		100,00	Persen	Rp 3.704.939.090,05			100,00	Persen	Rp 3.862.092.032,05
						Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		34,64	Per 1000 kelahiran hidup	Rp 934.094.400,00			32,54	Per 1000 kelahiran hidup	Rp 1.009.799.120,00
						Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia		100,00	Persen	Rp 150.000.000,00			100,00	Persen	Rp 177.615.661,00
						Cakupan Kepesertaan JKN		98,70	Persen	Rp 9.345.417.000,40			98,80	Persen	Rp 9.812.687.850,42
						Persentase Kabupaten/kota mencapai target STBM		28,58	Persen	Rp 822.393.050,00			42,86	Persen	Rp 863.512.702,50
						Positive Rate HIV		2,15	Persen	Rp 837.995.323,36			2,09	Persen	Rp 879.895.089,53
						Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)		95	Persen	Rp 1.287.995.323,36			95	Persen	Rp 1.352.395.089,53
						Angka keberhasilan Pengobatan kasus TBC (success rate)		85	Persen	Rp 851.426.400,00			85	Persen	Rp 893.997.720,00
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		91	Persen	Rp 862.995.323,36			92	Persen	Rp 906.145.089,53
						Persentase hipertensi dalam pengendalian		30	Persen	Rp 550.000.000,00			35	Persen	Rp 577.500.000,00
						Persentase jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer		20	Persen	Rp 6.187.116.595,20			40	Persen	Rp 6.545.588.085,96
						Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional		20,25	Persen	Rp 225.000.000,00			28,35	Persen	Rp 236.250.000,00
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		30	Persen	Rp 1.649.090.502,80			40	Persen	Rp 1.780.660.688,94
						Prevalensi obesitas > 18 Tahun		22,1	Persen				22,1	Persen	
						Persentase merokok penduduk 10-21 Tahun		7,6	Persen				7,6	Persen	
						Persentase Diabetes dalam pengendalian		12	Persen				14	Persen	
						Prevalensi Depresi pada usia > 15 Tahun		1,00	Persen				1,00	Persen	
						Jumlah Pelayanan Kesehatan bergerak yang dilaksanakan di kampung		4,00	Layanan				4,00	Layanan	
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat		1,00	Kab/Kota				2,00	Kab/Kota	
						Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		20,00	Persen				30,00	Persen	
						Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		50	Persen				60	Persen	
						Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta		1	Kab/Kota				2	Kab/Kota	
						Persentase Kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar		50	Persen				60	Persen	
						Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar		45	Persen				50	Persen	

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	26.527.701.194,92		100	Persen	Rp	35.573.444.352,47
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	5.470.083.913,16	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Unit	Rp	8.645.767.157,72
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	2.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Unit	Rp	3.100.000.000,00
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	1.000.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Unit	Rp	1.200.000.000,00
1	2	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	10.940.167.826,31	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Unit	Rp	17.291.534.315,43
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Provinsi Papua Barat	4	Layanan	Rp	1.300.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4	Layanan	Rp	1.365.000.000,00
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	800.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Unit	Rp	840.000.000,00
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Unit	Rp	1.000.000.000,00
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1	Unit	Rp	2.037.533.368,61	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Unit	Rp	2.081.910.037,04
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Provinsi Papua Barat	5	Unit	Rp	500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	7	Unit	Rp	525.000.000,00
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	5	Unit	Rp	500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	7	Unit	Rp	525.000.000,00
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Provinsi Papua Barat	2	Unit	Rp	400.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	2	Unit	Rp	420.000.000,00
1	02	02	1.00	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	1.850.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	1	Unit	Rp	2.000.000.000,00
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	2.000.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	2.100.000.000,00
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Manokwari	1	Paket	Rp	2.500.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Paket	Rp	3.125.000.000,00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	25.466.911.101,50		100	Persen	Rp	26.902.144.286,00
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1210	Orang	Rp	2.817.319.460,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	1331	Orang	Rp	3.099.051.406,00
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1210	Orang	Rp	2.022.121.750,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	1331	Orang	Rp	2.095.133.825,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 750.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi		1	Dokumen	Rp 787.500.000,00
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 184.094.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 222.299.120,00
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 177.615.661,00
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 157.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 165.375.000,00
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 367.500.000,00
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 157.500.000,00
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 401.007.398,40	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 421.057.768,32
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 2.189.976.616,80	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 2.299.475.447,64
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 132.132.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 138.738.600,00
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 164.893.050,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp 173.137.702,50
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 9.195.417.000,40	Pajak Rokok; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Dokumen	Rp 9.655.187.850,42
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 913.728.243,75	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;		1	Dokumen	Rp 959.414.655,94
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 692.115.492,60	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp 726.721.267,23
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp 3.415.133.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan; DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1	Dokumen	Rp 3.585.890.070,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027						
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1					2	3	4		5	6	7	8	9		10			
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp	157.500.000,00
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	125.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1	Dokumen	Rp	131.250.000,00
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Papua Barat		1	Unit	Rp	244.587.778,05	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		1	Unit	Rp	256.817.166,95
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	170.985.150,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	179.534.407,50
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Provinsi Papua Barat		1	Paket	Rp	290.899.350,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Paket	Rp	305.444.317,50
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	550.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	577.500.000,00
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Provinsi Papua Barat		44518	Keluarga	Rp	249.999.999,50	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		44518	Keluarga	Rp	262.500.000,00
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100	Persen	Rp	2.550.000.000,00			100	Persen	Rp	2.677.500.000,00
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	420.000.000,00
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	420.000.000,00
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Dokumen	Rp	315.000.000,00
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	400.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	420.000.000,00
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	250.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	262.500.000,00
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	250.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	262.500.000,00
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	550.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	577.500.000,00
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100	Persen	Rp	450.000.000,00			100	Persen	Rp	472.500.000,00
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Papua Barat		1	Dokumen	Rp	450.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan;		1	Dokumen	Rp	472.500.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3	4		5		6	7	8	9		10	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	1.550.000.000,00			100	Persen	Rp	1.662.500.000,00
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Provinsi Papua Barat	1	Unit	Rp	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		1	Unit	Rp	157.500.000,00
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	8	Unit	Rp	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		9	Unit	Rp	770.000.000,00
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Provinsi Papua Barat	10	Unit	Rp	700.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang		12	Unit	Rp	735.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten / Kota yang mencapai Eliminasi Malaria		14,29	Persen	Rp	350.826.153,76			14,29	Persen	Rp	417.483.122,98
						Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk		7,98	Per 1000 Penduduk	Rp	350.826.153,76			7,98	Per 1000 Penduduk	Rp	417.483.122,98
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	350.826.153,76			100	Persen	Rp	417.483.122,98
1.03	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	350.826.153,76	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	417.483.122,98
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan SDM Sesuai Standar		79,01	Persen	Rp	14.579.418.355,64			79,01	Persen	Rp	17.349.507.843,21
						Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya		40	Orang	Rp	23.830.539.958,80			40	Orang	Rp	23.830.539.958,80
						Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		71,42	Persen					71,42	Persen		
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM Provinsi	Persentase Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM Provinsi		100	Persen	Rp	400.000.000,00			100	Persen	Rp	1.400.000.000,00
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Provinsi Papua Barat	2	Orang	Rp	200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		5	Orang	Rp	700.000.000,00
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Provinsi Papua Barat	2	Orang	Rp	200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		5	Orang	Rp	700.000.000,00
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia		100	Persen	Rp	1.800.000.000,00			100	Persen	Rp	2.072.500.000,00
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Dalam & Luar Provinsi Papua Barat	10	Orang	Rp	1.500.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		11	Orang	Rp	1.600.000.000,00
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	472.500.000,00
1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua		100	Persen	Rp	4.000.000.000,00			100	Persen	Rp	4.250.000.000,00
1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Luar Provinsi Papua Barat	25	Orang	Rp	4.000.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		27	Orang	Rp	4.250.000.000,00
1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN		100	Persen	Rp	6.567.920.000,00			100	Persen	Rp	6.700.316.000,00
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Provinsi Papua Barat	14700	Orang	Rp	6.567.920.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		15435	Orang	Rp	6.700.316.000,00

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027					
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1					2	3	4		5		6	7	8	9		10	
1	02	03	4,04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil			100	Persen	Rp	960.000.000,00			100	Persen	Rp	1.500.000.000,00
1	02	03	4,04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Provinsi Papua Barat	5	Orang	Rp	960.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		8	Orang	Rp	1.500.000.000,00
1	02	03	4,05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			100	Persen	Rp	150.000.000,00			100	Persen	Rp	200.000.000,00
1	02	03	4,05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan masyarakat adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan masyarakat adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Provinsi Papua Barat	5	Orang	Rp	150.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		8	Orang	Rp	200.000.000,00
1	02	03	4,07		Pendayagunaan tenaga kesehatan			100	Persen	Rp	501.498.355,64			100	Persen	Rp	976.691.843,21
1	02	03	4,07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Provinsi Papua Barat	4	Orang	Rp	501.498.355,64	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		8	Orang	Rp	976.691.843,21
1	02	03	4,08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP			100	Persen	Rp	200.000.000,00			100	Persen	Rp	250.000.000,00
1	02	03	4,08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	200.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	250.000.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan		100	Persen	Rp	364.563.405,36			100	Persen	Rp	382.791.575,63
						Persentase Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha		100	Persen	Rp	364.563.405,36			100	Persen	Rp	382.791.575,63
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha		100	Persen	Rp	224.520.648,45			100	Persen	Rp	238.830.104,87
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Provinsi Papua Barat	3	Sarana	Rp	224.520.648,45	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		3	Sarana	Rp	238.830.104,87
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		100	Persen	Rp	140.042.756,91			100	Persen	Rp	143.961.470,76
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Papua Barat	1	Sarana	Rp	140.042.756,91	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Sarana	Rp	143.961.470,76
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		4	Kabupaten	Rp	822.453.065,66			4	Kabupaten	Rp	863.575.722,65
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	150.000.000,00			100	Persen	Rp	150.000.000,00
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan		1	Dokumen	Rp	150.000.000,00
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	300.000.006,00			100	Persen	Rp	157.500.010,00
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		0	Dokumen		

RENJA DINKES PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2027				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Dokumen	Rp	157.500.000,00
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	372.453.059,66		100	Persen	Rp	300.000.000,00
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	372.453.059,66	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	300.000.000,00
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			100	Persen	Rp	-		100	Persen	Rp	256.075.712,65
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	Provinsi Papua Barat	0	Dokumen	Rp	-	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	256.075.712,65
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna		71,42	Persen	Rp	519.750.000,00		71,42	Persen	Rp	545.737.500,00
1	02	07	3.01		Penyelenggaraan Akreditasi pada Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Lain, serta Rumah Sakit Baik Milik Pemerintah Daerah maupun Swasta	Persentase Rumah Sakit terakreditasi paripurna		67	Persen	Rp	519.750.000,00		67	Persen	Rp	545.737.500,00
						Persentase Puskesmas terakreditasi		96,29	Persen				96,29	Persen		
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Provinsi Papua Barat	3	Unit	Rp	204.750.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5	Unit	Rp	214.987.500,00
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Provinsi Papua Barat	3	Unit	Rp	157.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5	Unit	Rp	165.375.000,00
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Provinsi Papua Barat	3	Unit	Rp	157.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5	Unit	Rp	165.375.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		13,09	Persen	Rp	3.126.687.538,61		13,09	Persen	Rp	3.720.758.170,95
						Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Terkait Penurunan Prevalensi Stunting)		100	Persen	Rp	3.126.687.538,61		100	Persen	Rp	3.720.758.170,95
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	3.126.687.538,61		100	Persen	Rp	3.720.758.170,95
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	Rp	3.126.687.538,61	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1	Dokumen	Rp	3.720.758.170,95
1	02	02				Usia Harapan Hidup (UHH) Orang Asli Papua		65,56	Tahun	Rp	52.500.000.000,00		65,56	Tahun	Rp	62.475.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Penduduk OAP yang menerima Pelayanan Program Papua Sehat		3500	Orang	Rp	52.500.000.000,00		4000	Orang	Rp	62.475.000.000,00
1	02	02	1.02		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		100	Persen	Rp	52.500.000.000,00		100	Persen	Rp	62.475.000.000,00
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Provinsi Papua Barat	3500	Orang	Rp	52.500.000.000,00	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	4000	Orang	Rp	62.475.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026 ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029 di tahun 2026 dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. **Prioritaskan Program dan Kegiatan Utama:** Pada saat anggaran terbatas, penting untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak besar dan mendukung pencapaian tujuan utama organisasi atau instansi.
2. **Fleksibilitas Anggaran:** Renja harus dirancang dengan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan kondisi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Hal ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian tanpa harus mengganggu keseluruhan rencana.

3. Pengendalian dan Monitoring Anggaran: Penting untuk melakukan pengendalian dan monitoring anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. Hal ini membantu mengidentifikasi potensi *overspending* atau kekurangan anggaran yang perlu segera ditangani.
4. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pembelajaran dari evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.
5. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyusunan Renja dapat membantu mendapatkan masukan yang berharga dan mendukung keberhasilan implementasi. Komunikasi yang baik dengan stakeholder juga penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
6. Pemanfaatan Sumber Daya Alternatif: Jika ketersediaan anggaran tidak mencukupi, pertimbangkan untuk memanfaatkan sumber daya alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor, atau penggalangan dana melalui program kemitraan.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2026, terdapat beberapa kaidah atau prinsip yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas implementasi. Berikut adalah beberapa kaidah pelaksanaan Renja, yaitu:

1. Konsistensi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan: Renja harus konsisten dengan tujuan dan sasaran organisasi atau instansi. Setiap

program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

2. **Partisipasi dan Keterlibatan:** Melibatkan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Renja. Partisipasi aktif dari berbagai stakeholder dapat meningkatkan akseptabilitas dan dukungan terhadap program yang direncanakan.
3. **Keterukuran dan Realistik:** Renja harus dirancang secara keterukuran dan realistis, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada. Tujuan dan target yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan memperhitungkan kondisi dan potensi yang ada.
4. **Pengelolaan Risiko:** Identifikasi dan kelola risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan Renja. Dengan memahami potensi risiko, langkah-langkah pencegahan dan mitigasi dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pastikan proses pelaksanaan Renja dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi terkait anggaran, progres, dan hasil program harus dapat diakses oleh semua pihak terkait untuk memastikan pertanggungjawaban yang baik.
6. **Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja. Dengan memantau progres dan hasil secara terus-menerus, dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

7. Pengembangan Kapasitas: Tingkatkan kapasitas dan kompetensi tim pelaksana Renja melalui pelatihan dan pembinaan. Sumber daya manusia yang kompeten akan mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya yang menjadi rencana ke depan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Inventarisir kebutuhan: Lakukan analisis mendalam terkait kebutuhan dalam mewujudkan masyarakat Papua Barat Sehat.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi: Sosialisasikan dan edukasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
3. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bentuk kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung Provinsi Papua Barat Sehat. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program.
4. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari tindakan yang dilakukan.
5. Inovasi dan Penyesuaian: Terus lakukan inovasi dalam mewujudkan Papua Barat Sehat dengan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Dengan melaksanakan rencana tindak lanjut di atas secara komprehensif dan terencana, diharapkan perilaku sehat masyarakat dapat mencapai target dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Demikian Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2026 ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai rencana kita. Amin. Salam
Papua Barat SEHAT.



Manokwari, 10 Oktober 2025

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat**

**dr. Alwan Rimosan, Sp.B.Finacs
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 196910272000121004**